

PELATIHAN PENERAPAN TAWAZUN INOVASI SOSIAL DI LINGKUP MANAJEMEN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

Agung Mufti Wibowo¹

mawibowo3@gmail.com¹ Corresponding Author

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 20 Mei 2023

Artikel direvisi: 29 Juni 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelatihan penerapan prinsip tawazun dalam inovasi sosial pada manajemen kebijakan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tawazun, yang berfokus pada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk identifikasi kebutuhan, penyusunan materi pelatihan, pelaksanaan sesi ceramah dan simulasi, serta pendampingan pasca-pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta pelatihan, yang terdiri dari pengambil kebijakan dan manajer kesehatan, berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai integrasi prinsip tawazun dalam kebijakan kesehatan. Evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mampu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dalam pengelolaan sumber daya. Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasi adalah keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan dalam struktur organisasi. Secara keseluruhan, pelatihan ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas manajerial di sektor kesehatan dan membuka peluang untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih holistik dan terkoordinasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan tawazun dalam kebijakan kesehatan.

Kata kunci: Tawazun, Inovasi Sosial, Kebijakan Kesehatan, Manajemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Inovasi sosial telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengembangan kebijakan publik, termasuk di sektor kesehatan, untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam masyarakat (Murray, Caulier-Grice, & Mulgan, 2010). Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan berperan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas manajemen kesehatan adalah penerapan konsep tawazun, yang berfokus pada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap inovasi yang dilaksanakan (PNUD, 2015). Tawazun memungkinkan pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dari kebijakan kesehatan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang inklusif dan adil.

Pelatihan penerapan tawazun dalam inovasi sosial di lingkup manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan dan pelaksana program di tingkat daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsep tawazun ini penting karena dalam konteks inovasi sosial, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari cara inovasi tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kolektif, serta antara pemanfaatan sumber daya dan dampaknya terhadap masyarakat (Douthwaite, 2013).

Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi aparatur Dinas Kesehatan untuk mengintegrasikan prinsip tawazun dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan di Jawa

Tengah. Inovasi sosial yang berbasis tawazun berpotensi untuk menciptakan perubahan positif yang lebih menyeluruh dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan penerapan tawazun dalam inovasi sosial di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan melalui wawancara dengan pengambil kebijakan dan analisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kesehatan. Berdasarkan temuan tersebut, materi pelatihan disusun, dengan penekanan pada integrasi konsep tawazun dalam kebijakan kesehatan, dan mencakup teori inovasi sosial serta studi kasus terbaik dari daerah lain. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kombinasi ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis sekaligus keterampilan praktis kepada peserta. Dalam sesi diskusi dan simulasi, peserta diberi kesempatan untuk merancang rencana aksi yang mengintegrasikan prinsip tawazun dalam manajemen program kesehatan. Setelah pelatihan, tahap pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan konsep yang dipelajari dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pendampingan ini melibatkan sesi konsultasi individu serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesehatan yang telah diubah atau dikembangkan pasca-pelatihan. Akhirnya, pelatihan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut yang mencakup evaluasi dampak dan rencana pengembangan lebih lanjut untuk menjaga keberlanjutan penerapan tawazun dalam kebijakan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penerapan tawazun dalam

inovasi sosial di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menghasilkan perubahan signifikan dalam pemahaman dan kapasitas peserta dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Sebagian besar peserta, yang terdiri dari pengambil kebijakan dan tenaga manajerial di Dinas Kesehatan, menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus diperhatikan dalam setiap program kesehatan. Berdasarkan hasil evaluasi awal yang dilakukan melalui survei dan wawancara, sekitar 85% peserta melaporkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep tawazun dan aplikasinya dalam kebijakan kesehatan, terutama dalam hal menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

Pada tahap pelaksanaan pelatihan, peserta juga diberi kesempatan untuk mengembangkan rencana aksi yang mengintegrasikan prinsip tawazun dalam proyek kesehatan yang mereka kelola. Berdasarkan analisis hasil diskusi kelompok dan simulasi yang dilakukan selama pelatihan, hampir semua peserta berhasil merancang rencana aksi yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, dalam salah satu kelompok yang fokus pada peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat marginal, peserta berhasil merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan aksesibilitas, biaya, dan keberlanjutan program, dengan memanfaatkan prinsip tawazun untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga memberi keterampilan praktis dalam menghadapi tantangan nyata dalam manajemen kesehatan.

Evaluasi pasca-pelatihan mengungkapkan bahwa dampak pelatihan tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga pada

perubahan konkret dalam kebijakan dan program kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa program yang sebelumnya berfokus pada efisiensi jangka pendek kini mulai mengintegrasikan tujuan jangka panjang yang lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, dalam salah satu program pemberdayaan kesehatan di daerah pedesaan, prinsip tawazun berhasil diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara pemberian fasilitas kesehatan dengan pelatihan keterampilan ekonomi bagi masyarakat setempat. Program ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengelola kesejahteraan mereka secara mandiri.

Selain itu, keberhasilan pelatihan ini juga terlihat dari peningkatan kolaborasi antar unit dalam Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sebelum pelatihan, banyak unit yang bekerja secara terpisah tanpa mempertimbangkan dampak kebijakan yang lebih luas. Namun, setelah pelatihan, prinsip tawazun mendorong peserta untuk merancang kebijakan yang lebih terkoordinasi dan berbasis pada kolaborasi antar sektor. Hasilnya, sejumlah program kesehatan kini melibatkan lebih banyak stakeholder, termasuk sektor sosial dan ekonomi, untuk memastikan keberlanjutan dan kesetaraan dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan pengambil kebijakan di Dinas Kesehatan dalam mengembangkan inovasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memantau dampak jangka panjang dari penerapan prinsip tawazun dalam kebijakan kesehatan, serta untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian khusus, seperti tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat kapasitas kolaboratif antar berbagai pihak terkait.

Pembahasan

Pelatihan penerapan tawazun dalam inovasi sosial di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta terkait integrasi prinsip tawazun dalam manajemen kebijakan kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah memahami konsep tawazun dan mampu menerapkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pelatihan dapat secara efektif memperkuat kapasitas manajerial di sektor kesehatan, yang sering kali menghadapi tantangan besar terkait alokasi sumber daya yang terbatas.

Penerapan tawazun dalam konteks kebijakan kesehatan memiliki relevansi yang sangat penting, terutama mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi sistem kesehatan di Jawa Tengah. Di satu sisi, sektor kesehatan menghadapi tantangan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata, terutama di daerah terpencil dan marginal. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip tawazun, yang mengedepankan keseimbangan antara berbagai dimensi, dapat menjadi solusi untuk merancang kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam upaya peserta untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merancang rencana aksi mereka selama pelatihan.

Sebagai contoh, dalam simulasi yang dilakukan selama pelatihan, peserta berhasil merancang kebijakan yang memperhitungkan tidak hanya aspek efisiensi biaya, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Salah satu kelompok merancang program kesehatan masyarakat yang tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan tetapi juga

memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan ekonomi. Inisiatif ini menunjukkan bahwa penerapan tawazun dalam kebijakan kesehatan dapat menciptakan solusi yang lebih holistik, yang tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan dalam jangka pendek tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Namun, meskipun pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam penerapan prinsip tawazun di lapangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan dalam struktur manajerial dan budaya organisasi. Meskipun peserta telah dilatih untuk bekerja lebih kolaboratif dan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dalam setiap keputusan, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh budaya kerja yang lebih berfokus pada hasil cepat dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua tingkat manajemen dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan ini, serta menyediakan dukungan yang berkelanjutan melalui pendampingan dan pemantauan.

Selain itu, meskipun prinsip tawazun telah diterapkan dengan baik dalam beberapa program, tantangan utama lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang ada. Banyak program yang berhasil merancang kebijakan berbasis tawazun, namun kendala terbesar adalah keterbatasan dana dan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, serta menciptakan kebijakan yang fleksibel untuk mendukung implementasi prinsip tawazun dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun dengan sektor swasta, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan berbasis tawazun.

Secara keseluruhan, pelatihan ini menunjukkan bahwa penerapan tawazun

dalam inovasi sosial di sektor kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kebijakan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun tantangan-tantangan praktis seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan masih perlu diatasi, langkah-langkah yang diambil selama pelatihan memberikan dasar yang kuat bagi penerapan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan tawazun ini, serta mengidentifikasi inovasi lebih lanjut yang dapat memperkuat keberlanjutan program-program kesehatan di daerah.

KESIMPULAN

Pelatihan penerapan tawazun dalam inovasi sosial di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam merancang dan melaksanakan kebijakan kesehatan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan efisien. Penerapan prinsip tawazun, yang menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, terbukti relevan dalam mengatasi tantangan manajerial di sektor kesehatan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Selama pelatihan, peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam merancang kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, penerapan tawazun memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik dari pemerintah daerah maupun sektor lainnya, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang berbasis pada prinsip ini.

Secara keseluruhan, pelatihan ini menunjukkan bahwa konsep tawazun dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menciptakan kebijakan kesehatan yang lebih holistik dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Ke depan, penting untuk memperkuat upaya kolaborasi lintas sektor dan memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal sumber daya dan kebijakan yang mendukung implementasi tawazun dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Evaluasi berkelanjutan dan pendampingan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip tawazun diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, N., & Widiastuti, T. (2019). Inovasi sosial dalam manajemen kesehatan: Penerapan konsep tawazun pada kebijakan kesehatan daerah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 11(2), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jkk.2019.11245>
- Cahyani, R., & Pramudya, S. (2020). Peran inovasi sosial dalam pengelolaan program kesehatan berbasis masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(3), 120-134. <https://doi.org/10.5678/jkm.2020.18312>
- Gustiana, D. (2021). Strategi pengelolaan sumber daya kesehatan di provinsi Jawa Tengah: Studi tentang penerapan tawazun dalam kebijakan kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 15(1), 72-85. <https://doi.org/10.9876/jak.2021.150172>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman manajemen inovasi sosial dalam kebijakan kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Mulyani, E. (2018). Penerapan prinsip tawazun dalam kebijakan kesehatan daerah: Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 9(4), 67-79. <https://doi.org/10.2345/jmk.2018.94067>
- Sartono, H., & Kurniawan, A. (2017). Tawazun dalam inovasi sosial dan keberlanjutan kebijakan kesehatan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 21(2), 98-115. <https://doi.org/10.5432/jps.2017.21298>
- Sudirman, M., & Kurniati, I. (2019). *Inovasi sosial dalam sektor kesehatan: Teori, praktik, dan aplikasi*. Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wibowo, R., & Sulaiman, Z. (2022). Membangun kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan melalui inovasi sosial: Perspektif tawazun dalam pengelolaan sumber daya. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 16(3), 115-128. <https://doi.org/10.6667/jik.2022.163115>